

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu serta menganalisis bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data berdasarkan dua pendekatan tersebut adalah sumber data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan ahli-ahli di bidang hukum pidana dan HAM. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Non Random Sampling*). Analisis data pada penelitian hukum yuridis normatif ini secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru

Hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* bahwa kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. *Kedua*, Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan asalkan memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi, akhirnya penulis merekomendasikan untuk agar hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik serta mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya.

Kata Kunci : Pencabutan Hak Politik, Terpidana Korupsi, Hukum Pidana&HAM

ABSTRACT

This study aims to find anyone convicted of corruption can be sentenced to an additional form of revocation of certain political rights as well as to analyze how the justification of criminal law and human rights against the verdict in a corruption case that impose additional penalty of revocation of certain political rights. The study was based on research with a normative juridical approach to legislation (statute approach) and approaches the case (case approach). The source of the data is based on two approaches are secondary data sources or literature data and documents in the form of legal materials. The materials primary law consists of legislation, official records or minutes in the legislation and the decisions of the judges of secondary legal materials in the form of interviews with experts in the field of criminal law and human rights. In accordance with the data source as described above, in this study data collection through interviews combined with data collection using sampling techniques aiming (purposive Non Random Sampling). Analysis of the data on normative legal research is descriptive qualitative, in which the material or materials such law to be further studied and analyzed in its content, so that can know the level of synchronization, eligibility norms, as well as the submission of ideas that the new norm

It can be concluded, first that the defendant criteria that an additional penalty may be imposed revocation of the rights of the rights that defendants have a political position or a position in which the convicted person guilty of corruption by abusing the authority or power that he has. Second, the revocation of the right to vote and be elected in public office of criminal law perspective allowed as long as the load restrictions of validity and revocation is declared when to begin the exercise of such rights. The imposition of additional criminal disenfranchisement and be elected in public office is not contrary to human rights (HAM) insofar as they meet the preconditions have been determined. Based on research, it can be concluded the imposition verdict additional penalty of revocation of the right to vote and be elected into public office to convict corruption is an effort that is wary for corruption convicts as well as preventive measures of corruption, ultimately the author recommends to order judges to be consistent in imposing additional criminal revocation lists when political rights as well as the entry into force and the deadline for entry into force.

Keywords: Revocation Political Rights, Convicted of Corruption, Criminal Law & Human Rights